

ASBTRAK

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan bimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul “Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penyelesaian Melalui Diversi Pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri) ”.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara melalui diversi; (2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusinya dalam penyelesaian perkara melalui diversi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, apabila proses Diversi berhasil sebelum tahap persidangan maka Penyidik dan Penuntut Umum menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan dan berdasarkan Penetapan tersebut Penyidik dan Penuntut Umum dapat menerbitkan SP3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Apabila proses Diversi berhasil dalam tahap persidangan maka Berita Acara dan hasil Diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan penghentian perkara tersebut; (2) kendala-kendala dalam pelaksanaan proses Diversi, yaitu : (a) ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan poses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi belum diatur dengan Peraturan Pemerintah; (b) Penyelesaian perkara tindak pidana melalui Diversi belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat; (c) Dalam pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi belum ada aturan / regulasi secara jelas; (d) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum didukung adanya Sumber Daya Masyarakat (SDM), sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai. Adapun solusi untuk mengatasi kendala-kendala di atas adalah dengan melakukan koordinasi antar aparat penegak hukum dan dalam jangka panjang mendorong pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dan latihan secara terpadu bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara dengan pelaku Anak dan dalam jangka pendek mendorong instansi masing-masing untuk melakukan sosialisasi serta memberi petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui Diversi.

Kata kunci : Diversi, Peradilan, Anak.

ABSTRACT

Law on Criminal Justice System Child determines that the Criminal Justice System Child, implemented based on the principle of protection; justice; non-discrimination; the best interests of the child; respect for the views of the child; survival and development of the Child; Children coaching and guidance; proportionate; deprivation of liberty and criminal prosecution as a last resort; and avoidance pembalasan. Untuk the authors interested in writing a thesis entitled "Settlement of the Case Through Diversion In Criminal Justice System Child (A Case Study of Settlement Through the Regional Law Diversion In Wonogiri District Court)" ..

Thesis writing is aimed at: (1) identify and analyze how the implementation process of the settlement of the case through versioned; (2) to identify and analyze the constraints and solutions in resolving the case through versioned based on Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System.

The results showed that: (1) Implementation of the Diversion of the offenses committed by the Child, held in each level of examination, either investigation, prosecution and examination in court, if the process Diversion successfully before the trial phase, the investigators and prosecutors deliver the results Diversion to the President of the Court Determination of the country to be made and by prescribing it investigators and prosecutors can publish SP3 (letter Command Termination of Investigation) and the Prosecution Cessation Assessment Letter (SKPP). If the Diversion process succeeded in the trial phase, the Minutes and the results submitted to the Chairman Diversion District Court for the termination of the case made Determination; (2) constraints in the implementation of the Diversion process, namely: (a) the provisions of the guidelines for the implementation poses Diversion, ordinances, and coordination of the implementation of the Diversion has not been regulated by the government; (b) Settlement via Diversion criminal case can not be fully accepted by society; (c) In monitoring the implementation of the Diversion agreement there is no rule / regulation clearly; (d) Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children are not supported by the Community Resources (HR), infrastructure and adequate financing. As a solution to overcome the constraints of the above is the coordination between law enforcement agencies and in the long term to encourage the government to carry out education and training in an integrated manner for law enforcement officers who handle cases with perpetrators of the Son, and in the short term to encourage the respective agencies to disseminate and provide technical guidance in the implementation of settling disputes through Diversion.

Keywords: Diversion, Justice, Child.